

PERTEMUAN SOSIALISASI PERHUTANAN SOSIAL DAN PEMBENTUKAN  
KELOMPOK TANI HUTAN DI DESA SESE SALU, PAKU DAN RANDAN BATU



DISUSUN OLEH  
PROJECT OFFICER KAB. TANA TORAJA  
KONSORSIUM KAPABEL

DESEMBER 2020  
TANA TORAJA



KANOPI  
HIJAU

BUMI  
LESTARI

## A. ALAS PIKIR

Program **Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan** merupakan program yang diusung oleh Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim dan Lingkungan (KAPABEL) sebagai bentuk adaptasi masyarakat dalam menghadapi berbagai fenomena bencana alam sebagai akibat dari perubahan iklim yang terjadi di sepanjang Hulu dan Hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang. Tujuan dari program ini adalah melakukan penguatan perhutanan sosial dibagian hulu dengan mendorong pangan hutan, peningkatan tata Kelola pesisir dan daya dukung adaptasi perubahan iklim di hilir DAS Saddang, penguatan kebijakan lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan program adaptasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas dan dukungan pemangku kepentingan dalam adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan dan penyebarluasan pengetahuan. Secara umum, ada tiga capaian program untuk masyarakat sebagai penerima manfaat yaitu kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi bencana akibat perubahan iklim, pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan membangun kewirausahaan sosial yang berkelanjutan.

Tana Toraja merupakan salah satu dari 3 kabupaten yang berada dalam wilayah administrasi Hulu DAS Saddang, dimana lokasi yang menjadi intervensi program berada di Desa Randan Batu, Kecamatan Makale selatan serta di Desa Sese Salu dan Desa Paku yang berada di Kecamatan Masanda. Seluruh aktifitas masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan lahan dari ketiga desa tersebut hampir semuanya berada dalam kawasan hutan negara dalam hal ini Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas yang juga merupakan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddan I sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan.

Maraknya aktifitas konversi hutan menjadi lahan pertanian dalam Kawasan berakar dari pertambahan penduduk yang terus meningkat dan juga keterbatasan lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar hutan. Tanpa pengelolaan yang tepat, hal ini dapat mengancam keberadaan dan kelestarian hutan, sehingga menyebabkan menurunnya fungsi dan daya dukung DAS yang kemudian akan berimplikasi pada peningkatan kebencanaan di wilayah ekosistem DAS Saddang.

Hadirnya program ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dengan mendorong pengusulan skema perhutanan sosial melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk memperoleh izin kelola lahan dalam kawasan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan program yaitu penguatan perhutanan sosial dibagian hulu DAS Saddang berbasis peningkatan ketahanan pangan hutan sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim. Pendekatan perhutanan sosial melalui kelompok tani hutan diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan dan aspek sosial ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Keberhasilan capaian program tentunya tidak akan terlepas dari dukungan serta partisipasi langsung dari masyarakat dan juga beberapa instansi pemerintahan terkait. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi program dan perhutanan sosial di tingkat desa, sekaligus membentuk kelompok tani hutan (KTH) di desa Sese Salu, Paku dan Randan Batu sebagai salah satu syarat untuk pengusulan skema perhutanan sosial.

## B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah;

1. Sosialisasi program **Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan** dan Perhutanan Sosial di tingkat Desa
2. Membentuk kelompok tani hutan di Desa Paku, Sese Salu dan Randan Batu

## C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara pertemuan langsung dalam bentuk sosialisasi program dan perhutanan sosial di 3 Desa intervensi program di Kabupaten Tana Toraja. Ketiga Desa tersebut adalah Desa Sese Salu dan Desa Paku, Kecamatan Masanda, serta Desa Randan Batu Kecamatan Masanda

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 yaitu dengan : (1) pembatasan jumlah peserta; (2) pemberian jarak antar tempat duduk; (3) kewajiban menggunakan masker; (4) cek suhu badan; (5) kewajiban untuk mencuci tangan sebelum memasuki ruang pertemuan.

### 1. Desa Randan Batu, Kec. Makale Selatan

#### 1.1 Waktu dan Tempat

Sosialisasi perhutanan sosial di Desa Randan Batu diadakan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 di kantor Desa Radan Batu, kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.30 Wita sampai dengan pukul 13.00 wita.

#### 1.2 Peserta

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi perhutanan sosial ini sebanyak 26 orang yang terdiri dari perwakilan KPH saddang I, Perangkat Desa, masyarakat Desa Randan batu, dan Project Manajemen Unit Kabupaten Tana Toraja. Daftar peserta yang hadir pada pertemuan tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah;

Tabel 1. Daftar dan jumlah peserta sosialisasi perhutanan sosial di Desa Randan Batu

No	Peserta	Jumlah	Keterangan
1	Sekretaris Desa	1	
2	Kepala Dusun	2	
3	Ketua BPD	1	
4	Ketua RT	1	
5	Pemangku Adat	1	
6	Masyarakat	15	10 Perempuan dan 5 Laki-Laki
7	Penyuluh Kehutanan	1	
8	Polisi Kehutanan	1	
9	Project Manajemen Unit Tana Toraja	3	
<b>Total</b>		<b>26</b>	

### 1.3 Output Kegiatan

Dalam kegiatan ini ada beberapa output, informasi, dan kesepakatan yang diperoleh, diantaranya;

1. Tersosialisasinya program adaptasi masyarakat ekosistem DAS Saddang berbasis pengelolaan pangan hutan, skema perhutanan sosial dan juga syarat pengajuan izin Perhutanan Sosial.
2. Masyarakat Randan Batu yang berdomisili di Dusun Putu yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas mulai memahami dan mengakui bahwa lahan yang selama ini mereka kelola adalah benar berada dalam kawasan setelah diperlihatkan peta citra kawasan hutan Desa Randan Batu.
3. Diperoleh informasi bahwa orang-orang yang juga mengelola lahan dalam kawasan hutan di Dusun Putu bukan hanya masyarakat Desa Randan Batu, tetapi juga berasal dari Desa Parindingan. Bahkan menurut Kepala Dusun Putu, Sekitar 80% orang yang mengelola lahan di kawasan tersebut adalah masyarakat Desa Parindingan.
4. Masyarakat yang hadir dalam pertemuan sosialisasi program akan mulai mengidentifikasi, mencatat, dan mengajak orang-orang yang mengelola lahan dalam kawasan hutan (Dusun Putu) untuk hadir dalam pertemuan selanjutnya untuk membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH).
5. Kepala Dusun Putu akan mencatat jumlah masyarakat parindingan yang mengelola lahan dalam kawasan hutan di Dusun Putu yang nantinya juga akan diundang dalam pertemuan lanjutan pembentukan kelompok Tani Hutan.

## 2. Desa Sese Salu, Kecamatan Masanda

### 2.1 Waktu dan Tempat

Sosialisasi perhutanan sosial di Desa Sese Salu diadakan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 di kantor Desa Sese Salu, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 12.30 wita.

### 2.2 Peserta

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi perhutanan sosial ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari perwakilan KPH saddang I, Perangkat Desa Sese Salu, masyarakat Desa Sese Salu, kelompok PKK, dan Project Manajemen Unit Kabupaten Tana Toraja. Daftar peserta yang hadir pada pertemuan tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah;

Tabel 2. Daftar dan jumlah peserta sosialisasi perhutanan sosial di Sese Salu

No	Peserta	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1	
2	Aparat Desa	7	
3	Ketua RT	5	
4	Kepala Dusun	3	
5	Kelompok PKK	8	
6	Masyarakat	10	2 Perempuan dan 8 Laki-Laki
7	Penyuluh Kehutanan	1	
8	Polisi Kehutanan	2	
9	Project Manajemen Unit Tana Toraja	3	
<b>Total</b>		<b>40</b>	

### 2.3 Output Kegiatan

Dalam kegiatan ini ada beberapa output, informasi, dan kesepakatan yang diperoleh, diantaranya;

1. Tersosialisasinya program adaptasi masyarakat ekosistem DAS Saddang berbasis pengelolaan pangan hutan, skema perhutanan sosial dan juga syarat pengajuan izin Perhutanan Sosial.
2. Berdasarkan hasil identifikasi peta citra terhadap masyarakat yang mengelola lahan dalam kawasan hutan, kebanyakan masyarakat mengelola lahan di sekitar dusun Pauan dan Rattlepang
3. Kepala Dusun Rattlepang dan Pauan beserta masyarakat yang hadir dalam sosialisasi akan membantu mengidentifikasi orang-orang yang mengelola lahan dalam kawasan hutan di sekitar dusun tersebut
4. Akan dilakukan pertemuan selanjutnya di Dusun Pauan dan Rattlepang untuk membentuk Kelompok Tani Hutan di minggu pertama januari tahun 2021.

### 3. Desa Paku, Kecamatan Masanda

#### 3.1 Waktu dan Tempat

Sosialisasi perhutanan sosial di Desa Paku diadakan pada hari Jumat, 18 Desember 2020 di kantor Desa Paku, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja. Kegiatan ini dimulai pada pukul 09.30 Wita sampai dengan pukul 11.40 wita.

#### 3.2. Peserta

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi perhutanan sosial ini sebanyak 39 orang yang terdiri dari perwakilan KPH saddang I, aparat Desa Paku, masyarakat Desa Paku, Kepala Camat Masanda, Penyuluh Pertanian, dan Project Manajemen Unit Kabupaten Tana Toraja. Daftar peserta yang hadir pada pertemuan tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah;

Tabel 3. Daftar dan jumlah peserta sosialisasi perhutanan sosial di Paku

No	Peserta	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1	
2	Aparat Desa	8	
3	Kepala Dusun	4	
4	Ketua RT	9	
5	Kelompok PKK	2	
6	Masyarakat	7	4 Laki-laki dan 3 Perempuan
7	Kepala Camat Masanda	1	
8	Penyuluh Pertanian	1	
9	Penyuluh Kehutanan	1	
10	Polisi Kehutanan	2	
11	Project Manajemen Unit Tana Toraja	3	
<b>Total</b>		<b>39</b>	

### 3.3 Output Kegiatan

Dalam kegiatan ini ada beberapa output, informasi, dan kesepakatan yang diperoleh, diantaranya;

1. Tersosialisasinya program adaptasi masyarakat ekosistem DAS Saddang berbasis pengelolaan pangan hutan, skema perhutanan sosial dan juga syarat pengajuan izin Perhutanan Sosial.
2. Berdasarkan hasil identifikasi peta citra terhadap wilayah yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas, masyarakat yang hadir dalam sosialisasi tersebut masih belum yakin bahwa lahan yang mereka kelola berada dalam kawasan. Keberadaan kawasan dalam peta masih jauh dari fungsi Area penggunaan Lain (APL)
3. Disepakati untuk dilakukan identifikasi dan pendataan orang-orang yang mengelola lahan dalam kawasan di sekitar Dusun Puncak dan Rante Alla oleh masing-masing kepala Dusun
4. Disepakati untuk kembali dilakukan pertemuan lanjutan di minggu pertama Januari 2021 untuk pembentukan kelompok tani hutan di Desa Paku

## D. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN

### 1. Desa Randan Batu, Kec. Makale Selatan

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi program, perhutanan sosial dan pembentukan kelompok tani hutan di Desa Randan Batu adalah sebagai berikut;

1. Kegiatan tidak berjalan tepat waktu karena beberapa peserta datang terlambat
2. Ada beberapa perwakilan kepala dusun dan masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi karena kepala desa Randan Batu kurang aktif dan kooperatif dalam program Kapabel.
3. Belum dilakukan Pembentukan Kelompok Tani Hutan di Desa Randan batu sesuai dengan rencana awal kegiatan, hal ini dikarenakan wilayah kawasan yang akan diusulkan untuk izin Perhutanan Sosial kebanyakan dikelola oleh masyarakat Desa Parindingan sehingga perlu dilakukan pendataan juga

pencatatan ulang jumlah masyarakat Randan Batu dan Parindingan yang mengelola dalam kawasan tersebut.

## **2. Desa Sese Salu, Kec. Masanda**

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi program, perhutanan sosial dan pembentukan kelompok tani hutan di Desa Sese Salu adalah sebagai berikut;

1. Ada beberapa perwakilan kepala dusun dan masyarakat yang mengelola lahan dalam kawasan tidak hadir dalam sosialisasi
2. Belum dilakukan Pembentukan Kelompok Tani Hutan di Desa Sese Salu sesuai dengan rencana awal kegiatan, karena masyarakat desa yang berdomisili di Dusun Pauan dan Rattelepang sepakat untuk terlebih dahulu mencatat dan mendata orang-orang yang mengelola dalam kawasan hutan untuk diundang pada saat pertemuan pembentukan kelompok tani hutan yang direncanakan pada minggu pertama januari 2021

## **3. Desa Paku, Kec. Masanda**

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi program, perhutanan sosial dan pembentukan kelompok tani hutan di Desa Paku adalah sebagai berikut;

1. Tidak semua masyarakat yang menurut kepala Desa mengelola lahan dalam kawasan hadir dalam pertemuan sosialisasi
2. Belum dilakukan Pembentukan Kelompok Tani Hutan di Desa Paku sesuai dengan rencana awal kegiatan, karena masyarakat desa Paku masih tidak ingin terburu-buru membentuk kelompok tani hutan. Kepala Dusun akan kembali mensosialisasikan program ini ke masyarakat yang mengelola lahan dalam kawasan sembari mendata jumlah yang mengelola lahan untuk diundang dalam pertemuan lanjutan pembentukan kelompok tani hutan
3. Listrik di Kantor Desa Paku tidak mengalir sehingga alat presentasi seperti *LCD* dan microphone tidak digunakan dalam pertemuan tersebut.

## **E. RENCANA TINDAK LANJUT**

Setelah kegiatan sosialisasi perhutanan sosial yang masing-masing dilakukan di desa Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Desa Sese Salu dan Desa Paku, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja, pihak program manajemen unit dalam hal ini *Field Officer* bersama dengan kepala Dusun di masing-masing Desa tersebut akan melakukan identifikasi dan pencatatan jumlah orang yang mengelola lahan dalam kawasan hutan. Selain itu juga akan kembali dilakukan pertemuan lanjutan di tingkat dusun untuk agenda pembentuk kelompok tani hutan di masing-masing desa pada minggu pertama bulan Januari tahun 2021.

## F. DOKUMENTASI KEGIATAN

### 1. Desa Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kab. Tana Toraja



Gambar 1. Sosialisasi Program dan Perhutanan sosial oleh Field Officer dan Program Officer



Gambar 2. Peserta kegiatan Sosialisasi Program dan Perhutanan sosial di Desa Randan Batu



Gambar 3. Foto Bersama peserta kegiatan sosialisasi perhutanan sosial di Desa Randan Batu

## 2. Desa Paku, Kecamatan Masanda, Kab. Tana Toraja



Gambar 4. Sosialisasi Program dan Perhutanan sosial oleh Field Officer dan Program Officer



Gambar 5. Peserta kegiatan Sosialisasi Program dan Perhutanan sosial di Desa Paku



Gambar 6. Foto Bersama peserta kegiatan sosialisasi perhutanan sosial di Desa Paku

3. Desa Sese Salu, Kecamatan Masanda, Kab. Tana Toraja



Gambar 7. Sosialisasi Program dan Perhutanan sosial oleh Field Officer dan Program Officer



Gambar 8. Peserta kegiatan Sosialisasi Program dan Perhutanan sosial di Desa Sese Salu



Gambar 9. Identifikasi lokasi lahan masyarakat Desa Sese Salu di dalam kawasan hutan

## Lampiran I

### NOTULENSI PERTEMUAN

#### 1. Desa Randan Batu, Kec. Makale Selatan, Kab. Tana Toraja

Tempat, tanggal kegiatan : Kantor Desa Randan Batu, 17 Desember 2020

Peserta kegiatan : Penyuluh Kehutanan KPH Saddang I, Polisi Kehutanan KPH Saddang I, Sekretaris Lembang, Kepala Dusun, Kepala RT, Aparat Lembang, dan Calon anggota KTH dan Program Manajemen Unit (PMU) Tana Toraja.

Kegiatan ini dibuka oleh Program Officer Kabupaten Tana Toraja selaku Moderator Kegiatan yang kemudian dilanjutkan oleh field officer Desa Randan Batu untuk memaparkan sosialisasi program, perhutanan sosial, dan tentang pembentukan kelompok tani hutan kepada peserta kegiatan.

**Daud lintin** selaku sekretaris Lembang bersyukur dengan adanya program ini di Lembang Randan batu, “jadi kita masih diperhitungkan diatas sebagai lembang yang perlu di majukan”. Beliau mengajak kepada masyarakat agar lebih antusias untuk ikut dalam program ini. “Program ini akan memberikan manfaat kepada kita semua, apalagi banyak masyarakat yang selama ini mengelolah dalam kawasan tanpa memiliki izin, ikuti semua yang akan program ini laksanakan kedepannya, semua ini untuk kebaikan kita semua masyarakat yang ada di Lembang Randan Batu”

Setelah pemaparan program, skema perhutanan sosial, dan tata cara pembentukan kelompok tani hutan oleh field officer desa Randan Batu, kemudian dilanjutkan dengan agenda sesi tanya jawab. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut;

**Natalia L.** : Apa peran kelompok pemuda, disabilitas dan kelompok perempuan dalam pembentukan Kelompok nantinya?

**Jawab** : Untuk pemuda, disabilitas dan perempuan dalam hal ini kategori “rentan” nantinya akan kita fokuskan dalam beberapa kegiatan program, seperti kegiatan penyemaian di rumah bibit, pelatihan-pelatihan pengelolaan dan pembuatan produk-produk hasil hutan di *home industry* dan juga akan banyak dilibatkan dalam aktifitas-aktifitas lain di kelompok nantinya.

**Mariana D** : Apakah ada pengurus disetiap program yang ditawarkan, yaitu pembentukan KTH, pengadaan rumah bibit, pengadaan rumah industri, apakah yang menjadi pengurusnya hanya yang memiliki lahan dalam kawasan?

**Jawab** : Iya, akan ada pengurus yang akan mengisi struktur kelompok tani hutan yang di bentuk nantinya, pengurus-pengurus tersebut nantinya tidak hanya akan diisi oleh masyarakat yang hanya memiliki lahan dalam kawasan saja, tetapi juga akan diisi oleh perwakilan pemuda, perempuan, dan perempuan rentan yang kriterianya tadi sudah dijelaskan.

**Polisi Kehutanan KPH Saddang I** : Jika masyarakat Randan Batu yang mengelola lahan dalam kawasan sudah memperoleh izin perhutanan sosial, maka kami dari pihak pemerintah dalam hal ini kehutanan tidak akan melarang lagi masyarakat dalam mengelolah kawasan hutan, dengan catatan tidak boleh menebang pohon lagi dalam kawasan hutan untuk memperluas lahan, walaupun sudah ada izin kelolanya. Kelestarian hutan harus tetap dijaga.

Diskusi terkait batas kawasan dan batas desa

**Sekertaris Desa** : Masyarakat Desa Randan Batu tidak memahami batas administrasi kawasan, mereka menganggap jalan ke kelurahan pasang adalah batas administrasi desa, mereka tidak memasukan kawasan hutan kedalam desa karena menganggap kawasan hutan adalah milik negara.

**Kepala Dusun** : Dulu waktu kita melakukan pengukuran untuk batas desa kita ambil sampai di jalan Desa menuju ke kelurahan pasang, kita tidak memasukan kawasan hutan yang berbatasan dengan jalan tersebut karena kita beranggapan bahwa kawasan hutan adalah milik negara bukan milik Desa, makanya masyarakat Randan Batu hanya sedikit yang berani mengelola dalam kawasan dan justru lebih banyak dikelola oleh masyarakat Desa Parindingan.

**Masyarakat** : Yang banyak mengelola dalam kawasan hutan yang ada di Dusun Putu, Desa Randan Batu adalah masyarakat Desa Parindingan, mereka sudah bermukim di dalam sejak lama dan sudah berkeluarga sampai memiliki anak dan cucu di dalam.

Dalam diskusi terkait batas kawasan hutan, sekertaris Desa memberikan saran kepada polisi kehutanan dan penyulug untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa parindingan yang mengelola dan bermukim dalam kawasan hutan tersebut agar mereka juga mengetahui bahwa tempat mereka bermukim adalah masih dalam kawasan Lembang Randan Batu.

**Sekertaris Lembang** : Kami dari Desa Randan Batu akan memfasilitasi untuk mengadakan pertemuan antara masyarakat Desa Parindingan dengan masyarakat desa Randan Batu utamanya masyarakat dusun putu.

**Polisi Kehutanan** : Kalau saya boleh menyarankan, sebaiknya pihak Randan Batu juga menyiapkan peta gambaran Desa sendiri, meskipun itu dalam bentuk copyan, setidaknya nanti ada gambaran kepada masyarakat Parindingan pada saat pertemuan lanjutan yang membahas batas Desa dan Kawasan. Kami dari pihak Kehutanan akan membantu menyampaikan terkait batas kawasan diantara kedua Desa ini, sehingga tidak ada lagi saling klaim kawasan dan bisa mempermudah dalam proses pengusulan perhutanan sosial nantinya.

**Project Officer** : Dari pemerintah desa Parindingan sendiri apakah mereka mengetahui bahwa masyarakat yang mengelola lahan dalam kawasan itu masuk ke dalam administrasi Desa Randan Batu ataukah mereka justru mengklaim bahwa yang dikelola oleh masyarakatnya adalah masih dalam administrasi Desa Parindingan?

**Sekertaris Lembang** : Kalau soal itu kami juga belum tahu pak, soalnya kami sendiri yang mengklaim bahwa batas desa kami hanya sampai pada Jalan Desa yang menghubungkan ke Kelurahan Pasang. Kami tidak mengakui daerah kawasan yang sudah dikelola oleh masyarakat Parindingan karena itu sudah kawasan, dan kawasan itu milik negara bukan Desa.

**Project Officer** : kalau kasusnya seperti itu, mungkin lebih baik pertemuan selanjutnya nanti kita akan hadirkan juga masyarakat parindingan yang mengelola lahan dalam kawasan tersebut untuk merundingkan soal kasus ini. Kita masih belum bisa membentuk kelompok tani hutan, jika masih belum ada kejelasan soal tata batas wilayah administrasi Desa antara Randan Batu dengan Parindingan.

Dalam pertemuan ini juga disepakati beberapa agenda lanjutan terkait Pembentukan Kelompok Tani Hutan, diantaranya;

1. Akan di lakukan pendataan calon anggota yang memang benar - benar punya lahan dalam Kawasan hutan di dusun Putu' dan masyarakat Lembang Parindingan yang mengelola lahan dalam Kawasan.
2. Melakukan pengecekan lahan atau pengabilan titik koordinat calon anggota sebagai sampel bahwa lahan itu benar- benar di dalam Kawasan.
3. Akan dilakukan pertemuan di dua dusun tersebut untuk di lakukan pembentukan kelompok setelah terkumpul nama - nama calon anggota yang mengelola dalam Kawasan. Pertemuan ini di lakukan di pasar Pangra'ta tepatnya di pasar dan dilakukan di minggu kedua januari 2021 dengan alasan banyaknya kesibukan masyrakat dalam perayan NATAL dan TAHUN BARU.

## 2. Desa Sese Salu, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja

Tempat, tanggal kegiatan : Kantor Desa Sese Salu, 17 Desember 2020

Peserta kegiatan : Penyuluh Kehutanan KPH Saddang I, Polisi Kehutanan KPH Saddang I, Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala RT, Aparat Desa, Calon anggota KTH, dan Program Manajemen Unit (PMU) Tana Toraja.

Sekretaris Desa Sese salu selaku moderator kegiatan.

Sebelum kegiatan sosialisasi dimulai, terlebih dahulu dilakukan pembacaan doa yang dipimpin oleh majelis gereja.

Setelah pembacaan doa, dilanjutkan sambutan oleh kepala Desa sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Sambutan sebagai berikut; "Pemerintah Desa (Matus Sappedatu) mengucapkan banyak terimakasih kepada KAPABEL karena adanya program pendampingan di tanah toraja khususnya di lembang sesesalu". Kepala Desa menegaskan bahwa program ini bisa terealisasi di masyarakat melalui kelompok, bukan orang perorangan. Selain itu kepala lembang berharap kepada masyarakat agar program ini tidak disamakan dengan program-program lain ataupun program bantuan yang pernah ada di Desa. "Program ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa berkelanjutan. Misalnya program sebelumnya itu sudah ada bantuan tanaman buah-buahan dan bantuan kelompok tani madu yang ada di dusun pauan, semoga kelompok lebah madu yang di dusun pauan itu bisa di kembangkan kedepanya dan bisa bermanfaat secara khususnya masyarakat yang berada di sekitar Kawasan hutan"

Lanjut Pemaparan Materi Program oleh *Field Officer* (A. Haruna), Materi program Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pangan Hutan, Materi Perhutanan Sosial dan Materi Pembentukan Kelompok Tani Hutan.

Sekretaris Desa (Allo Boyong), menegaskan Kembali bahwa sesesalu menjadi sala satu wilayah yang diprioritaskan oleh program, karena berdasarkan data kehutanan, sesesalu merupakan wilayah yang dengan tingkat kerusakan hutan yang tinggi dan rawan bencana. "Semoga lewat kegiatan ini kelestarian alam kita bisa Kembali. Kemudian kegiatan dapat meningkatkan peran kelembagaan kelompok tani, tidak hanya kelompok dibentuk untuk menada bantuan setelah itu tidak ada keaktifan karena tidak adanya pendampingan di dalamnya seperti kelompok yang telah ada sebelumnya. Bahkan selaku pengurus kelompok pun tidak mengetahui apa tujuan dan tugasnya. Jadi diharapkan adanya bimbingan terkait tugas dan wewenan masing - masing anggota. Dan yang terpenting kegiatan ini nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat"

Sesi tanya jawab;

1. **Kepala Lembang** : Apakah calon anggota kelompok yang bermukim di luar dusun pauan tapi lahanya ada di dusun pauan bisa bergabung di kelompok yang ada di pauan?

**Jawab** : Terkait persyaratan tergabung dalam kelompok itu basisnya bukan perdesun tetapi skalanya itu lahan Kelola atau garapan, jadi meskipun orangnya berada di dusun lain selama itu warga lembang sesesalu yang dapat dibuktikan secara administrasi seperti KTP, KK dan punya lahan dalam Kawasan itu bisa saja masuk dalam anggota KTH, begitupun sebaliknya kalau misalnya ada orang yang

mengelola dalam kawasan di wilayah lembang sesesalu tetapi dari lembang lain dan ber KTP , KK di luar lembang itu tidak bisa bergabung dalam KTH.

2. **Kepala Lembang** : Kalau bisa ditunjukkan peta batas – batas Kawasan supaya jelas kebun yang mana saja yang masuk dalam kawasan?

**Jawab** : Menampilkan langsung di layar peta batas kawasan dan mendiskusikan langsung kepada masyarakat, berdasarkan hasil diskusi perlu ada tambahan di peta blok rehabilitai PT.VALE karena jangan sampai ada tumpang tindih pengelolaan dan mengidentifikasi lahan lahan masyarakat yang berada di luar dan di dalam kawasan.

3. **Ludia Datu Kombong** : Apakah program ini direalisasikan berdasarkan kelompok yang sudah terbentuk atau direalisasikan kelompok baru yang akan dibentuk?

**Jawab** : Berdasarkan data awal yang di dapat dari lembang memang hampir tiap dusun itu ada kelompok tani baik itu kelompok tani pertanian, kelompok ternak ataupun kwt, tetapi secara program terkait perhutana sosial syarat utama yg harus di fasilitasi adalah masyarakat yang punya lahan garapan di dalam Kawasan, tapi tidak menutup kemungkinan orang orang yang tidak punya lahan bisa terlibat dalam kegiatan program, misalnya kelompok rentan seperti yang saya jelaskan tadi seperti ibu ibu yang mungkin di tinggal cerai mati oleh suami itu bisa gabung dalam kelompok dan dilibatkan misalanya di kegiatan di rumah bibit, ataupun di pengelolaan industri rumah tangga nantinya.

Penyuluh KPH Saddang I ( Tarsisius), Memperjelas Kembali bahwa tujuan awal perhutanan sosial adalah memberikan akses atau izin kepada masyarakat untuk melanjutkan berkebun di dalam Kawasan, dan khususnya di lembang sesesalu karena dalam Kawasan lindung jangan sampai mengira bahwa di beri izin untuk merambah hutan ataupun memperluas areal garapan. Selon itu izin PS tersebut bukan mengubah status Kawasan hutan, jadi tertap statusnya sebagai Kawasan lindung hanya saja diberi akses Kelola dan tidak boleh di perjual belikan. Jadi yang perlu di pahami bahwa dalam Kawasan itu harus mengutamakan kelestarian karena hutan yang memberikan kita sumber mata air dan menjaga kita dari bencana alam seperti longsor yang terjadi di Kec. Masanda. Terkait luas lahan yang boleh di garap itu maksimal empat ha per kepala keluarga. Dan dalam kelompok nanti akan ada kelompok – kelompok kecil sebagai KUPS sesuai potensi yang dikelola.

Terakhir terkait Pembentukan Kelompok Tani Hutan di sepakati bahwa;

1. Akan dilakukan pendataan calon anggota yang memang benar - benar punya lahan dalam Kawasan di tiap dusun khususnya di dusun pauan dan rattelepang yang banyak mengelola dalam Kawasan.
2. Melakukan pengecekan lahan atau pengambilan titik koordinat calon anggota sebagai sampel bahwa lahan itu benar- benar di luar Kawasan.
3. Akan dilakukan pertemuan di dua dusun tersebut untuk di lakukan pembentukan kelompok setelah terkumpul nama - nama calon anggota yang mengelola dalam Kawasan. Pertemuan ini di lakukan di awal januari 2021 dengan alasan banyaknya kesibukan masyarakat dalam perayaan NATAL dan TAHUN BARU.

### 3. Desa Paku, Kec. Masanda, Kab. Tana Toraja

Tempat, tanggal kegiatan : Kantor Desa Paku, 18 Desember 2020

Peserta kegiatan : Penyuluh Kehutanan KPH Saddang I, Polisi Kehutanan KPH Saddang I, Penyuluh Pertanian, Kepala Camat Masanda, Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala RT, Aparat Desa, Calon anggota KTH, dan Program Manajemen Unit (PMU) Tana Toraja.

Sebelum kegiatan dimulai, salah satu majelis gereja dilembang Paku memimpin pembacaan do'a. Setelah majelis gereja selesai memanjatkan do'a dilanjutkan dengan sambutan Kepala Lembang sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Perhutanan Sosial dan Pembentukan Kelompok. Kepala lembang mengatakan terima kasih kepada Tim (konsorsium) KAPABEL karena program ini sebenarnya sangat membantu masyarakat di mana masyarakat yang mengelolah kawasan akan mendapatkan izin mengelolah kawasan dan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi sehingga program ini bisa berkelanjutan di kecamatan Masanda khususnya di Lembang Paku, selain dari pada itu Pak Lembang juga berharap masyarakat yang hadir pada hari ini lebih aktif di pertemuan, dalam artian lebih banyak bertanya agar kita bisa memahami tujuan program sehingga dapat melanjutkan informasi ini ketingkat dusunnya masing-masing dan inilah kesempatannya, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya.

Kemudian pak Lembang selaku moderator mempersilahkan tim KAPABEL untuk pemaparan Program, Sahrul Ramadan sebagai FO (Field Officer) membawa Program Adaptasi Masyarakat Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan dengan tema Sosialisasi Perhutanan Sosial dan Pembentukan Kelompok. Setelah pemaparan program Pak Lembang membuka babakan (sesi) Tanya jawab pertama dengan dua pertanyaan terlebih dahulu agar pertanyaan dapat berkelanjutan dan pertanyaan tidak berulang-ulang.

Sesi Tanya Jawab

1. Kepala Kampung (Dusun) Paku, Markus Mangapa memberikan pernyataan terlebih dahulu bahwa terima kasih karna diberikan peluang untuk masuk dan mengelolah kawan sehingga kami bersemangat, kemudian alangkah baiknya kalau jelas apa yang mau dikembangkan oleh masyarakat dalam kawasan yang tidak kurang dari dua hektar.
  - A. Komoditi atau tanaman-tanaman apa saja yang akan ditanam oleh masyarakat
  - B. Persoalan persemaian, apakah boleh dibangun di Lembang Paku dikarenakan antara tiga lembang yang di kena, Lembang Paku berada ditengah sehingga pengangkutannya juga bisa terkontrol
2. Kepala Kampung (Dusun) Punca mengatakan terima kasih, melanjutkan pertanyaan dari Kepala Kampung Paku yaitu yang pertama
  - A. Bagaimana mode-model atau persyaratan pembentukan kelompok
  - B. Berapa kelompok yang akan dibentuk di Lembang Paku

Kemudian saya, Sahrul Ramadan sebagai Fasilitator mencoba menjawab pertanyaan Kepala Kampung Paku, terkait dengan komoditi yang akan dikembangkan oleh masyarakat yaitu sukun dan umbi-umbian (porang dan talas jepang), inilah komoditi awal yang didorong oleh program ke masyarakat dan kalupun masyarakat punya rekomendasi komoditi umbi-umbian selain porang dan talas kita akan membahasnya

dikelompok yang akan terbentuk, kemudian menyangkut lokasi persemaian (rumah semai), diawal program hanya satu yang akan dibangun persemaian di kecamatan Masanda sehingga tiga Lembang akan bersaing merekomendasikan lokasi lahan persemaian yang tapi KAPABEL akan mengusahakan dan bila memungkinkan akan dibangun persemaian (rumah semai) di tiap Lembang dan bila terjadi hal buruknya itu hanya satu yang akan dibangun kita akan mengecek mengenai lahan ditiga desa dan yang menyebabkan tidak dibangunnya persemaian di Desa yaitu salah satunya adalah kemiringan tanah dan sumber air yang dibutuhkan kemudian pertanyaan dari kepala Kampung Punca, tentang model atau persyaratan kelompok, karna kondisi tidak kondusif sehingga kedepannya kami akan membuka lagi forum-forum kecil untuk dimasing-masing dusun karena kami menghindari konflik dan kecemburuan social antar dusun dan bila anggota kelompok lebih dari tiga puluh akan dibentuk GAPOKTAN.

Kemudian pak Dedy ingin menambahkan dan memperkenalkan diri kemudian mempertegas bahwa kegiatan ini hadir untuk membantu masyarakat yang mengelolah didalam kawasan yang selama ini kucing-kucingan dengan pemerintah kehutanan, itu kami bantu dalam hal pengurusan izin yang namanya perhutanan social yang memiliki lima skema yaitu HKM, HTR, HD, Kemitraan kehutanan dan HA, setelah menambahkan setiap slide materi saya paparkan pak Dedy membuka atau mengarahkan untuk diskusi lepas. Setelah itu Pak Camat mempersilahkan masyarakat berdiskusi lepas agar lebih santai, kemudian salah satu peserta bernama pak Andarias ingin bertanya, apa bedanya lima skema ini dalam perhutanan social? Kemudian pak Kepala Kampung menambahkan bagaimana yaitu bagaiman cara masyarakat masuk dalam kawasan untuk mengelolah kawasan kemudian bagaimana dan dimana kami mendapatkan bibit tanaman? Setelah itu pak Camat mencoba memberikan analogi untuk menjelaskan dan membuka sedikit wawasan masyarakat, "kata pak Camat", sayapun menanggapi dan menambahkan pernyataan pak Camat agar tujuan program lebih jelas.

Kemudian Pak Dedy menjawab pertanyaan dari pak Andarias tentang lima skema yang ada di perhutanan social, sebenarnya dari lima skema hamper semua sama saja cuman bentuk pengurusan izin yang berbeda kalau hutan desa itu diusulkan ditingkat desa/lembaga desa, kalau HKM itu diusul oleh kelompok tani hutan atau GAPOKTAN kalau lebih dari tiga puluh, nah kalau untuk HTR sendiri sama dengan HKM tadi tetapi focus pada satu kawasan saja dia di Hutan produksi, kalau Hutan Adat itu khusus untuk adat saja yang contohnya ada di bulukumba, ada namanya masyarakat kajang yang terkhusus masyarakat adat, kalau kemitraan itu masyarakat yang mau kerja sama dan mengelolah dalam kawasan seperti kelompok lebah madu. kemudian pak camat berharap program ini dapat berhasil karena kebutuhan masyarakat atau kelompok di fasilitasi oleh KAPABEL bayangkan 11 M anggaran untuk empat kabupaten sehingga program ini harus kita sambut dan di dukung dan kita malu kalau tidak berhasil

Pertanyaan berlanjut lagi di ibu Kepala Kampung punca yang mengatakan sungguh saya tidak mengerti kalau kita mengelolah lahan kembali pohonnya tidak ditebang, kemudian langsung ditanggapi bahwa meskipun masyarakat diberikan izin mengelolah kawasan, tetap saja tidak merubah status kawasan dan fungsi kawasan itu sendiri di mana program ini tetap menjaga kelestarian alam (hutan) kemudian pak camat mempertegas kembali dan memberikan penyuluh pertanian kesempatan untuk berkomentar, penyuluh pertanian ini mengatakan komoditi yang lagi tren sekarang yaitu Bite, keladi dan pasarnya ada kalau mengenai harga perkilonya itu dua puluh lima ribu rupiah kalau porang memang betul sudah ada yang kembangkan di lembang lain dan kalau ada komoditi yang di turunkan ke masyarakat harus familiar terlebih dahulu, kemudian memberikan saran kalau bisa kita bentuk kelompok hamparan dimana lahan

lahan yang berdekatan itulah yang dibuatkan kelompok agar kerja sama lebih kompak, setelah itu pak camat mengambil alih dan mempersilahkan peserta apabila masih ada yang ingin bertanya.

Pak Lembang bertanya, apakah ada biaya pembersihan dalam program? Jadi pak Dedy langsung menanggapi pertanyaan dari pak Lembang dan mengatakan kami diawal program akan fokus terlebih dahulu ditahap pembentukan kelompok untuk pengusulan izin perhutanan sosial jadi lebih baik kita tidak terlalu jauh dulu tindak lanjut kegiatan sementara izin belum keluar dan terkait bantuan pembersihan akan kami bahas ditingkat pimpinan dalam hal ini pimpinan bagian Hulu kalau sudah ada saya akan memberikan informasi kepada FO kemudian informasi dilanjutkan ke tingkat Lembang dan dari pihak KPH Saddang 1, pak tarsisius mengatakan roh dari program ini adalah memberikan izin kelolah kepada masyarakat yang sudah punya kebun dalam kawasan yang kegiatannya itu banyak seperti agroforestry, jasa lingkungan, silvo pasture dan HHBK jadi bisa juga ada kelompok kecil, misal ada kopi namanya itu kups kopi, kups lebah madu dan lain sebagainya, setelah penyampaian dari KPH Saddang 1, pak camat mengambil alih dan sebelum ditutup saya meminta kesepakatan bersama dibulan dan tanggal berapa kami bisa kembali beraktivitas di Lembang paku, sehingga disepakati tanggal 4 Januari sudah bisa mulai dan pak camatpun mengambil alih, sekedar mengingatkan untuk tetap memakai masker, jaga jarak dan kesehatan, kemudian di tanggal 20 Januari 2021 posko perbatasan akan aktif kembali, bila mana ada masyarakat yang dari luar Toraja lantas ingin masuk di Kabupaten Toraja harus memiliki surat Rapid Test, setelah penyampaian terkait corona dan informasi terbaru Pak Camat menutup kegiatan sosialisasi perhutanan social dan pembentukan kelompok dengan resmi.